



**NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU**

**No. Katalog : 4102002.8205
ISSN 2830-196X**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2023



Indeks Pembangunan Manusia

PROVINSI MALUKU UTARA

2023

Volume 12, 2024

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2023

Katalog	: 4102002.8205
ISSN	: 2830-196X
Nomor Publikasi	: 82000.24006
Ukuran Buku	: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: xii+67 halaman
Penyusun Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara
Penerbit	: ©BPS Kabupaten Halmahera Utara

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Maluku Utara

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2023

Pengarah :

Arifin M. Kahar, SST., M. Stat.

Penanggung Jawab Umum :

Arifin M. Kahar, SST., M. Stat.

Penyunting :

Gani Gunawan, S.Tr.Stat

Penulis Naskah :

Nada Salvia S.Tr.Stat

Pengolah Data :

Nada Salvia S.Tr.Stat

Penata Letak :

Nada Salvia S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenannya Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara 2023” dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan bagian dari upaya BPS Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka melihat secara garis besar tentang masalah kesejahteraan penduduk Kabupaten Halmahera Utara dengan merepresentasikan ke dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Perlu diketahui bahwa publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru yang telah menggunakan data terkini yaitu dengan sumber data Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menggunakan proyeksi hasil *Long Form* SP 2020 ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Tobelo, Agustus 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Utara

Arifin M. Kahar, SST., M.Stat.

DAFTAR ISI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 2023

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	3
1.1 Konsep Pembangunan Manusia	3
1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia	4
1.3 Perubahan Metodologi IPM.	5
1.4 Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	6
1.5 Penghitungan IPM Metode Baru.	7
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA	13
2.1 Sekilas Provinsi Maluku Utara.	13
2.2 Status Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara	16
PENDIDIKAN	21
KESEHATAN	27
KEHIDUPAN YANG LAYAK	35
5.1 Perekonomian	37
5.2 Ketenagakerjaan	38
5.3 Kemiskinan	39
KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1 Kesimpulan	43
6.2 Saran	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	6
Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum	7
Tabel 2.1 Perbandingan Tingkat Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2023	14
Tabel Lampiran 1 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Hasil Proyeksi <i>Long Form</i> SP2020 di Provinsi Maluku Utara (Tahun), 2020–2023	47
Tabel Lampiran 2 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Hasil Proyeksi SP2010 di Provinsi Maluku Utara (Tahun), 2020–2023	47
Tabel Lampiran 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Persen), 2020–2023	48
Tabel Lampiran 4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Tahun), 2020–2023	48
Tabel Lampiran 5 Pengeluaran Per kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (ribu rupiah), 2020–2023	49
Tabel Lampiran 6 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (UHH Hasil LFSP2020), 2020–2023	49
Tabel Lampiran 7 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (UHH Hasil SP2010), 2020–2023	50

DAFTAR GAMBAR

PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA

GAMBAR 2.1 Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kawasan Sulampua, 2023	15
GAMBAR 2.2 Sepuluh Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara, 2023.	15
GAMBAR 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara dan Indonesia 2020–2023	16
GAMBAR 2.4 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2021–2023	16
GAMBAR 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Sulampua, 2023. 17	
GAMBAR 2.6 Indeks Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Maluku Utara, 2023	17

PENDIDIKAN

GAMBAR 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Indonesia dan Provinsi Maluku Utara, 2020–2023	22
GAMBAR 3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2023	22
GAMBAR 3.3. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Maluku Utara, 2023 ...	23
GAMBAR 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Maluku Utara, 2023 ...	23
GAMBAR 3.5 Persentase penduduk 15 tahun ke Atas Provinsi Maluku Utara Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	24

KESEHATAN

GAMBAR 4.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia dan Provinsi Maluku Utara 2020–2023	29
GAMBAR 4.2 Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2023	29
GAMBAR 4.3 Persentase Penolong Proses Persalinan Terakhir dari Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin di Provinsi Maluku Utara, 2023	30
GAMBAR 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Maluku Utara, 2023	30
GAMBAR 4.5 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Utara, 2023	31
GAMBAR 4.6 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Maluku Utara, 2023	31

KEHIDUPAN YANG LAYAK

GAMBAR 5.1 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara, 2020–2023	35
GAMBAR 5.2 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara (ribu rupiah), 2023	36
GAMBAR 5.3 Produk Domestik Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ribu rupiah), 2023	36
GAMBAR 5.4 Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara (triliun rupiah), 2021–2023	37
GAMBAR 5.5 Produk Domestik Bruto (PDRB) Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (milliar rupiah), 2023	37
GAMBAR 5.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2023	38
GAMBAR 5.7 Distribusi Ekonomi Provinsi Maluku Utara, 2023	38
GAMBAR 5.8. Penduduk 15+ Bekerja di Provinsi Maluku Utara, 2023	39
GAMBAR 5.9. Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Provinsi Maluku Utara 2020–2023	39

IPM

Angka melek huruf (AMH)



Angka Harapan Lama Sekolah

27 komoditas PPP



96 komoditas PPP



rata ukur / geometrik

$$\frac{1}{3}(I_{\text{Kesehatan}} + I_{\text{Pendidikan}} + I_{\text{Pengeluaran}})$$

$$\sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Pengeluaran}}}$$

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

"Education is a human right with immense power to transform. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable human development."

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia bertitik tolak dari pemahaman bahwa proses pembangunan harus dapat memperluas pilihan. Seorang individu atau suatu keluarga lazimnya mempunyai banyak keinginan, baik yang muluk-muluk maupun yang sangat mendasar. Beberapa yang sangat mendasar adalah berharap keluarganya dapat hidup sehat dan berumur panjang. Tinggal di lingkungan yang sehat, terbebas dari berbagai wabah, serta memperoleh akses pada sanitasi dan air bersih. Individu tersebut menginginkan keluarganya memperoleh pendidikan dan pelatihan yang baik. Mereka berharap mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Individu tersebut berharap pula mampu membawakan diri dengan baik dalam pergaulan masyarakat. Mereka juga berharap dapat hidup dalam suasana yang bebas dan mempunyai hak untuk menyuarakan kepentingannya. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Menurut konsep ini pembangunan harus seimbang, yaitu antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal dan mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak hanya peduli dengan pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan ketrampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga peduli dengan pemanfaatan kemampuan tersebut, baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia.

Konsep pembangunan seperti diuraikan di atas nampaknya sederhana. Namun sebagai akibat dari penyederhanaan yang berlebihan terhadap tujuan pembangunan, konsep yang cukup komprehensif tersebut menjadi terlupakan. Misalnya dalam paradigma pembangunan ekonomi tujuan pembangunan disederhanakan menjadi pertumbuhan ekonomi/ peningkatan pendapatan per kapita saja.

Seringkali dinyatakan bahwa pendapatan dapat mewakili (*proxy*) dengan baik pilihan-pilihan lainnya. Tetapi sesungguhnya pernyataan tersebut di atas hanya sebagian saja dari kebenaran. Pendapatan memang dapat dipergunakan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan, menjaga/ meningkatkan kesehatan, tetapi pendapatan juga dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang

bertentangan dengan tujuan pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia seperti diuraikan tersebut di atas berbeda dari konsep/paradigma pembangunan yang berkembang selama setengah abad terakhir. Beberapa yang terpenting diantaranya adalah : pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan sumber daya manusia.

Perbedaan-perbedaan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memang penting. Tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin pembangunan manusia. Pendekatan kesejahteraan manusia melihat manusia hanya sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat pembangunan, bukan sebagai peserta aktif pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan diri pada sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat yang kurang beruntung, dan bukannya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat.

Konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan atau memberdayakan manusia, bukan pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu pendekatan pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek tersebut di atas. Dengan demikian konsep ini mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia.

1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan seperti telah diuraikan di atas, pembangunan manusia tidak diukur dari pendapatan semata, tetapi dari indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Pada tahap awal penyusunan indeks, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standart of living*).

Apa saja Manfaat IPM?

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro.
3. IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

1.3 Perubahan Metodologi IPM

Sejak *launching* IPM tahun 1990 telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP memperbaharui metodologi penghitungan IPM yang kemudian dilakukan penyempurnaan kembali pada tahun 2011. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara diantaranya India di tahun 2011, Filipina tahun 2012 serta China di tahun 2013.

Mengapa metodologi IPM diubah?

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja Yang Berubah?

1. Indikator

- Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2. Metode Penghitungan

- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.4 Implementasi IPM Metode baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Hitung		Rata-rata Ukur	
	$IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut.

Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

1.5 Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi pengeluaran (standar hidup layak).

Penghitungan Komponen IPM

1. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

UHH dihitung dari hasil Proyeksi *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Indeks pengetahuan dihitung rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} - I_{\text{RLS}}}{2}$$
$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$
$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

3. Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. Sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan

pertimbangan: Share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.

Indeks pengeluaran (standar hitung layak) dihitung dengan rumus berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Bagaimana mengukur kecepatan IPM?

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Bagaimana klasifikasi Pembangunan Manusia?

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- Rendah ($IPM < 60$)

IPM 2023 Regional Sulampua

1. Sulawesi Utara

75,04

2. Sulawesi Selatan

74,60

3. Sulawesi Tenggara

72,94

4. Sulawesi Tengah

71,66

72,75

7. Maluku Utara

70,98

8. Sulawesi Barat

69,80

9. Papua Barat

67,47

63,01

IPM

Maluku Utara

70,98

Komponen Pembentuk

Maluku Utara 2023



70,76



9,26



13,74



8,83

"All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual."

Bab ini membahas status pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara dan menyajikan secara ringkas capaian-capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Indikator capaian pembangunan manusia, sebagaimana diukur menggunakan IPM, akan dibahas dalam konteks komparatif secara wilayah (regional) dengan harapan dapat memberikan perbandingan capaian pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara dengan provinsi lainnya di Indonesia.

2.1 Sekilas Provinsi Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Utara secara geografis terletak antara $1^{\circ}57' - 2^{\circ}00'$ LU dan antara $128^{\circ}17' - 128^{\circ}18'$ BT. Secara Administratif, Halmahera Utara mempunyai wilayah batas, yaitu:

1. Batas Utara: Selat Morotai dan Samudra Pasifik.
2. Batas Timur: Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera.
3. Batas Selatan: Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
4. Batas Barat: Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki luas daratan sebesar 3.891,62 km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Galela Utara dengan luas 615,41 km², sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Tobelo dengan luas 33,51 km².

Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 199 desa, dimana Kecamatan Malifut memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 22 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Kecamatan Tobelo Barat dan Timur dengan jumlah desa masing-masing sebanyak 6 desa.

Dilihat dari kondisi cuacanya, temperatur udara di Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2023 berkisar antara $20,0^{\circ} \text{C} - 34,9^{\circ} \text{C}$. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei dan suhu terendah terjadi pada bulan Maret. Adapun rata-rata kecepatan angin antara 1,5 – 2,5 knot. Dimana kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Juni dan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Januari.

Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dipimpin oleh Bupati Ir. Frans Manery, dengan Wakil Gubernur Mulis Tapi Tapi S.Ag. Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 didominasi oleh Partai Demokrat

yang menduduki kursi sebanyak 4 orang. Kemudian PDI-P, PKB, PKPI, dan Partai Golkar masing-masing sebanyak 3 orang, selanjutnya Partai Nasional Demokrat dan Partai Hanura masing-masing sebanyak 2 orang. Sementara itu Partai Amanat Nasional, Perindo dan partai lainnya memiliki anggota 1 orang.

Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 203.213 jiwa, terdiri dari 103.984 laki-laki dan 99.229 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Tobelo dengan jumlah 34.062 penduduk, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Tobelo Barat dengan jumlah 6.080 penduduk. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, sex ratio seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara lebih dari 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada setiap kecamatan.

Dari sisi pendidikan, data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 8,65 tahun atau naik 0,02 tahun dibandingkan tahun 2022. Kenaikan yang relatif kecil ini terjadi karena tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 25 tahun keatas. Kebijakan yang diterapkan saat ini baru akan terasa beberapa tahun kedepan. Pada level provinsi, rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara masih di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku Utara yang sebesar 9,97 tahun. Selisih yang cukup besar dengan rata-rata lama sekolah provinsi dikarenakan besarnya kontribusi Kota

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 tercatat sebesar 13,68 tahun, hal ini berarti bahwa penduduk Halmahera Utara usia 7 tahun ke atas berpeluang bersekolah hingga lulus program Diploma satu (D1).

Di bidang ekonomi, nilai tambah yang tercipta dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 atau tercermin dari PDRB atas dasar harga yang berlaku sebesar 6.74 triliun rupiah. Kabupaten Halmahera Utara perlu mengoptimalkan

Tabel 2.1
Perbandingan Tingkat Pembangunan Manusia
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2023

Komponen	Maluku Utara	Indonesia
(1)	(2)	(3)
Harapan Hidup (tahun)	70,76	73,93
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,74	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,26	8,77
Pengeluaran Riil Perkapita (Rp. 000)	8.834	11.899
IPM	70,98	74,39

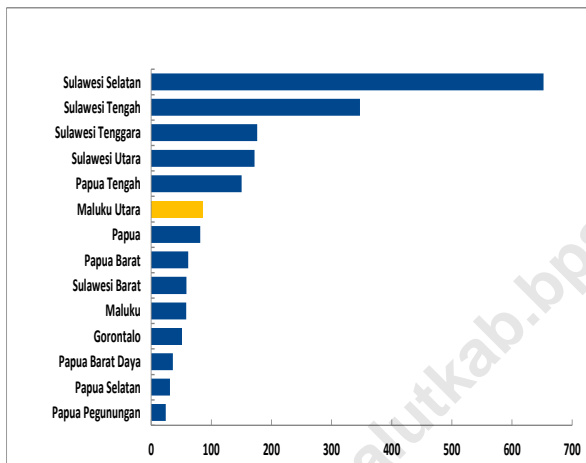
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas perekonomiannya.

Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian

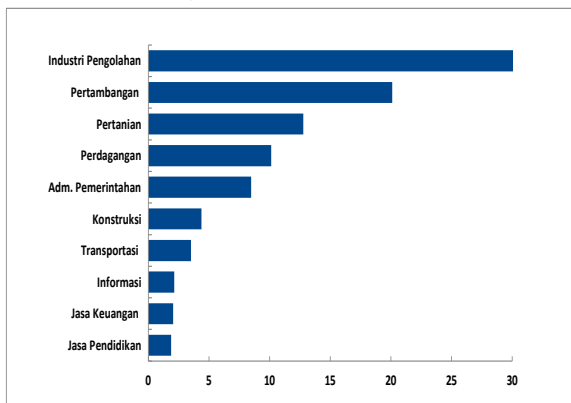
menyumbang lebih dari sepertiga perekonomian Halmahera Utara tahun 2023, yaitu sebesar 30,37 persen. Kategori terbesar kedua setelah industri pengolahan yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,49 persen) dan pada urutan ke tiga adalah administrasi pemerintahan, pertanian dan jaminan sosial wajib (12,18 persen).

Perekonomian Maluku Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 0,92 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai (3,74 persen).



GAMBAR 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kawasan Sulampua (triliun rupiah), 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 2.2
Sepuluh Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan perekonomian pada tahun 2023 disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan perekonomian pada tahun 2023 di dorong oleh perlambatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto.

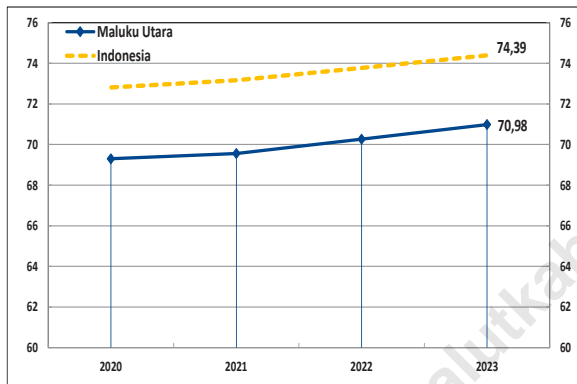
2.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 sebesar 68,26 kemudian meningkat menjadi 68,58 pada tahun 2021, angka IPM tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga tahun 2023 menjadi 69,79 atau bertambah 0,66 poin di bandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam hal pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara.

Status pembangunan manusia Halmahera Utara selalu berada pada level “sedang”. Bila dibandingkan

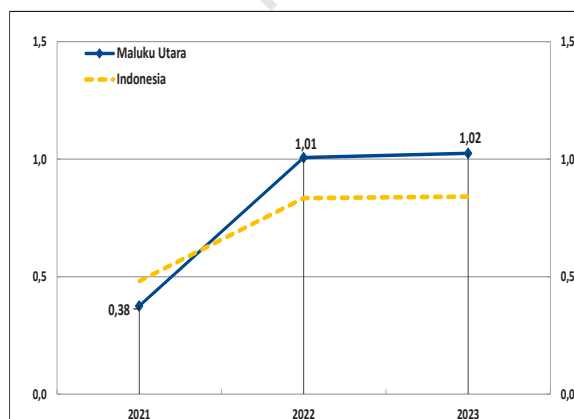
dengan IPM Maluku Utara, perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 masih berada di bawah IPM Maluku Utara, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara perlu ditingkatkan agar mencapai rata-rata kabupaten di Maluku Utara.

Dilihat dari laju pertumbuhan IPM selama tahun 2020–2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 0,47 persen. Seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, IPM Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2023 tumbuh 0,95 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



GAMBAR 2.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

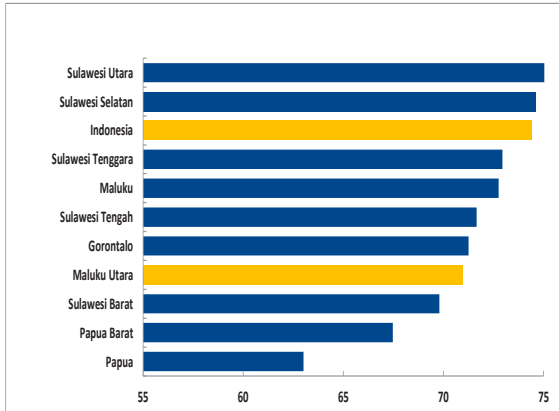


GAMBAR 2.4
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2021–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

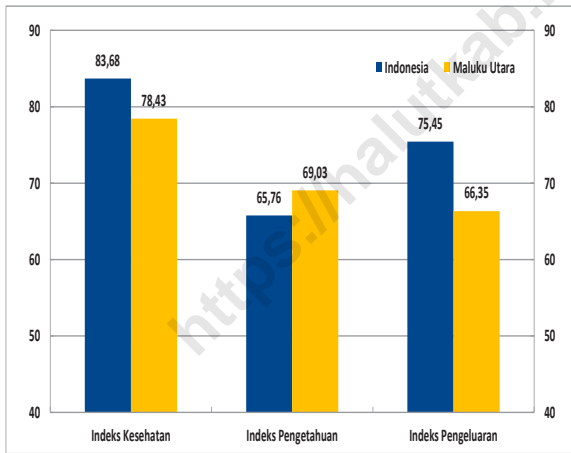
Secara peringkat, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 berada pada posisi ke-4 se-Maluku Utara. IPM Halmahera Utara berada di atas Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu.

Melihat capaian pembangunan manusia di tahun 2023 antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Maluku Utara sebagai rata-rata kabupaten terlihat bahwa capaian pembangunan manusia Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Maluku Utara.



GAMBAR 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kawasan Sulampua, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 2.6
Indeks Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

<https://halutkab.bps.go.id>

Harapan Lama Sekolah (HLS)

13,74

3 Kabupaten/Kota dengan HLS tertinggi

2. Tidore Kepulauan

3. Halmahera Utara



Rata rata Lama Sekolah (RLS)

9,26

3 Kabupaten/Kota dengan RLS tertinggi

2. Tidore Kepulauan

3. Halmahera Tengah



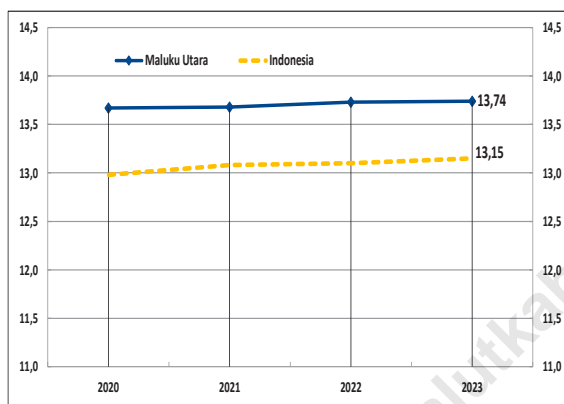
"The falsification of history has done more to impede human development than any one thing known to mankind."

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator-indikator sederhana yang meliputi tingkat pendidikan rata-rata penduduk dan harapan lama sekolah merupakan determinan penting IPM. Meski sekilas nampak sederhana, capaian indikator sederhana tersebut berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek dan *ultimate beneficiary* pembangunan itu sendiri.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Maluku Utara saat ini adalah perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan. Desakan untuk menjawab tantangan permasalahan ini menjadi makin dirasakan setelah Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu pendidikan berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

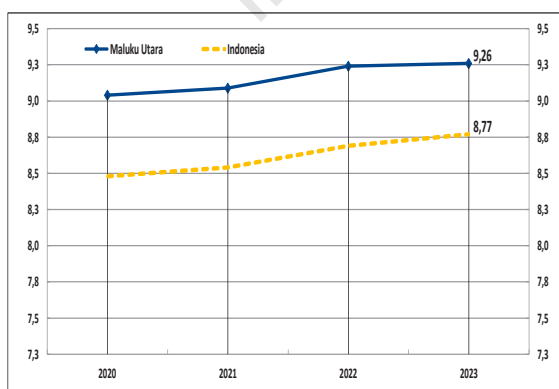
Pada bab ini akan dibahas status pembangunan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan disajikan lebih dari sekedar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah rata-rata lama bersekolah, harapan lama sekolah, dan lainnya sampai dengan sarana dan tenaga pendidikan. Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya.

Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang cukup sederhana adalah dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama tahun bersekolah penduduk. Cara yang lebih rinci adalah dengan melakukan disagregasi dan pengelompokan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikannya. Harapan lama sekolah (*excpeted years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.



GAMBAR 3.1
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Indonesia dan Provinsi Maluku Utara, 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 3.2
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia dan Provinsi Maluku Utara, 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

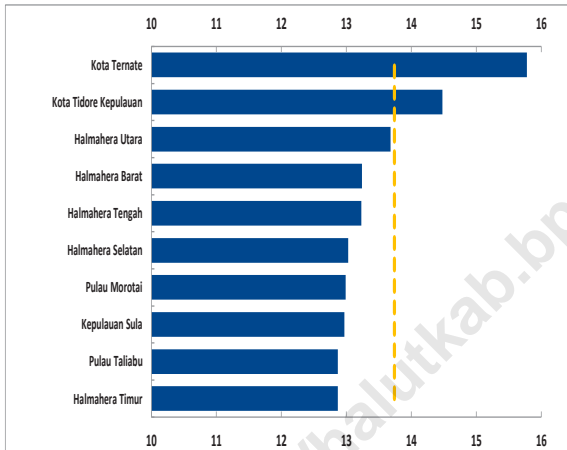
Perkembangan indikator pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,60 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,61 tahun pada tahun 2023. Capaian indikator harapan lama sekolah sudah lebih baik dibandingkan Maluku Utara sebagai rata-rata kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 sampai 14 tahun.

Kondisi yang baik ini juga dapat terlihat pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 sebesar 8,65 tahun artinya rata-rata penduduk Halmahera Utara bersekolah hingga SMP, namun tidak mencapai lulus SMP.

Angka ini menunjukkan belum tercapai secara maksimal program

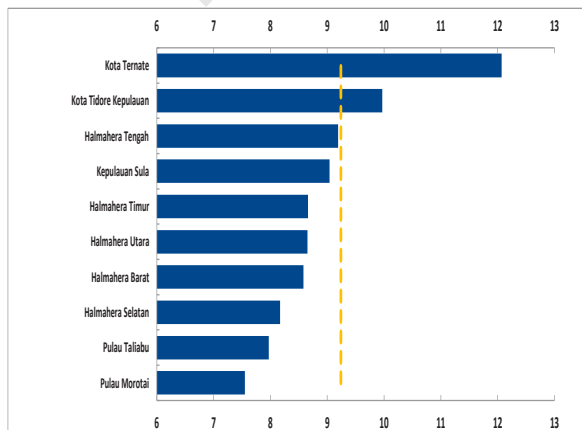
Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun di Kabupaten Halmahera Utara. Tingkat pendidikan penduduk ini sudah selanjutnya perlu ditingkatkan dengan menambahkan program-program pendidikan seperti beasiswa pendidikan dan bantuan untuk siswa dengan keluarga tidak mampu agar bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi.

Melihat perbandingan indikator pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat diketahui bahwa secara umum, bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki kualitas pembangunan di bidang pendidikan ketiga setelah Kota Ternate dan Kota Tidore.



GAMBAR 3.3
Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

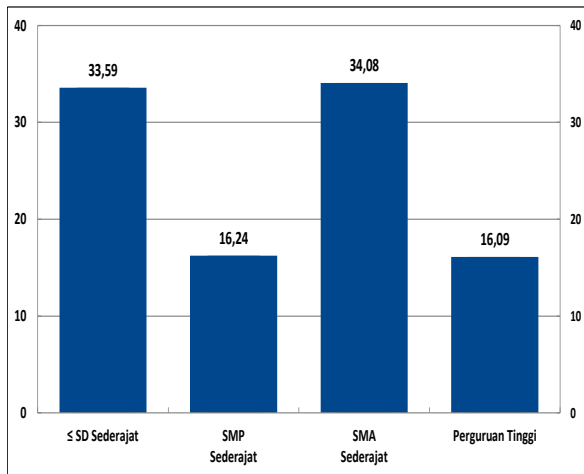


GAMBAR 3.4
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
di Provinsi Maluku Utara 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Angka harapan lama sekolah tertinggi di Kota Ternate (15,78 tahun) dan Kota Tidore Kepulauan (14,48 tahun), sedangkan harapan lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 13,68 tahun.

Rata-rata lama sekolah yang mencerminkan rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai penduduk berusia 25 tahun ke atas di suatu wilayah. Pada tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara mencapai 8,65 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Halmahera Utara hanya menamatkan jenjang pendidikan kelas 2 SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Halmahera Utara belum mencapai rata-rata RLS kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara dalam hal jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh penduduknya. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakmerataan kualitas



GAMBAR 3.5
Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Provinsi Maluku Utara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara.

Pengelompokan penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Halmahera Utara belum begitu menggembirakan, terlihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah sekolah kurang dari sama dengan SD sederajat sebesar 33,72 persen, SMP sederajat sebesar 16,58 persen, SMA sederajat sebesar 34,28 persen, dan perguruan tinggi hanya sebesar 15,41 persen saja. Dari data ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Halmahera Utara masih kekurangan SDM yang berkualitas dengan

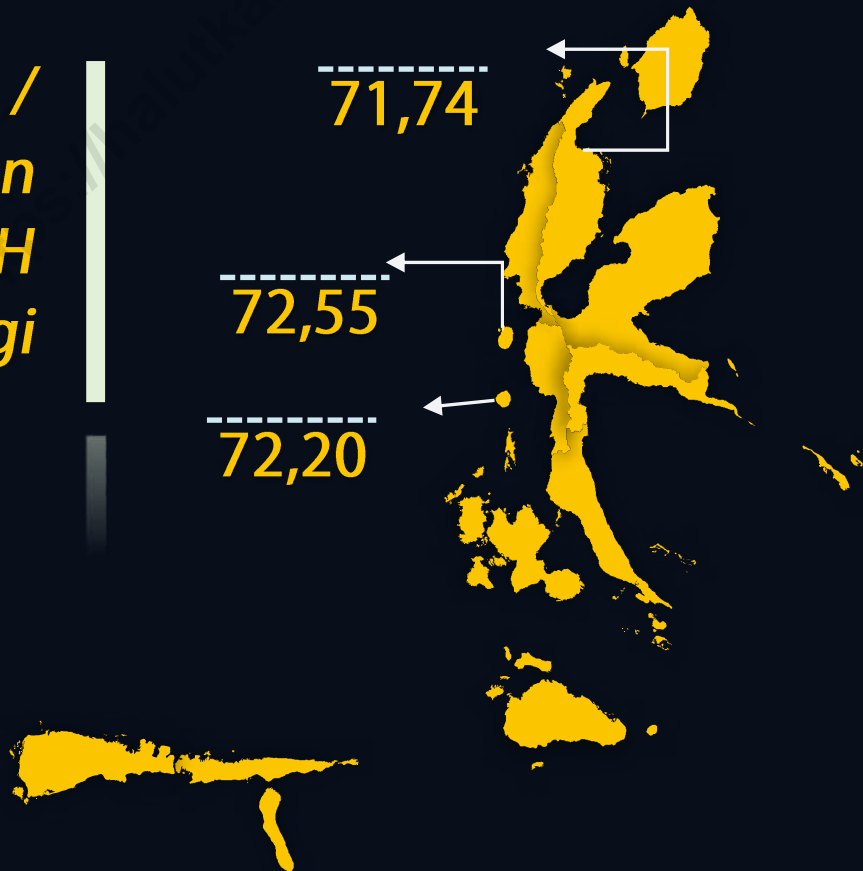
pendidikan tinggi di dalam angkatan kerjanya. Melihat kondisi SDM saat ini, apabila Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara fokus dan mengunggulkan sektor pertanian dalam tema pembangunan daerahnya cukup tepat karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari segala jenjang pendidikan. Namun demikian, untuk lebih mendukung perkembangan sektor pertanian ke arah yang lebih maju dan modern, pelatihan dan penyuluhan akan sangat diperlukan sejalan dengan meningkatnya tantangan yang muncul seiring kemajuan sektor pertanian, seperti modernisasi pertanian dan agrobisnis.



Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

70,76 |

**3 Kabupaten /
Kota dengan
UHH
tertinggi**



"There is one lesson from the past, in particular, that we cannot afford to ignore: You cannot make progress on gender equality or broader human development, without safeguarding women's reproductive health and rights."

Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan *people centered development*. Mengingat peran sangat penting kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan *people centered development*, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat.

Status kesehatan memberikan suatu kemampuan kepada seseorang untuk menjadi lebih produktif, dan dengan demikian mempunyai daya saing dalam pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar, jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi tujuan pembangunan milenium yang dicanangkan oleh PBB. Pada aspek pembangunan kesehatan target yang dituju sangat spesifik dan terukur, yaitu mengurangi Angka Kematian Anak (mengurangi hingga dua-per-tiga tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun), meningkatkan kesehatan ibu (menurunkan 3/4-nya Angka Kematian Ibu di Indonesia), serta mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Target pembangunan kesehatan yang menjadi tujuan pembangunan millenium pun berlanjut menjadi salah satu tujuan dari 17 tujuan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu tujuan ke-3, kehidupan sehat dan sejahtera (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia).

Dalam konteks Kabupaten Halmahera Utara, kompleksitas permasalahan kesehatan yang dihadapi hampir sama dengan yang dihadapi penduduk provinsi lainnya. Umur harapan hidup di Kabuapten Halmahera Utara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Indonesia sebagai rata-rata. Penolong proses kelahiran bukan oleh tenaga kesehatan masih cukup tinggi. Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan masih relatif tinggi. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia tenaga kesehatan baik dalam kuantitas maupun kualitas terutama untuk dokter, bidan desa dan perawat.

Selain itu akses terhadap pelayanan kesehatan (modern) juga masih tergolong rendah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dan atau yang tinggal di daerah tertinggal/terpencil/sulit dijangkau. Akses yang mereka perlukan tidak hanya dari segi keterjangkauan ke lokasi fasilitas kesehatan, tetapi juga dari segi dana dan pelayanan. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan menyangkut budaya/perilaku untuk hidup sehat, pemeliharaan kesehatan lingkungan juga masih kurang.

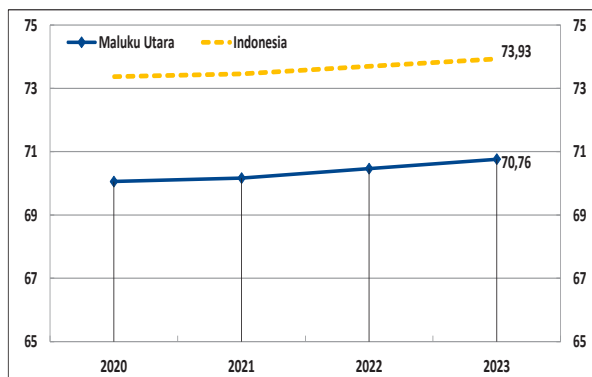
Penanganan masalah kesehatan tidak dapat dilakukan secara sekaligus, terkait dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut pendanaan dan sumberdaya yang tersedia. Dengan kondisi seperti itu, maka prioritas program dan kegiatan perlu dilakukan. Penanganan masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas. Tidak sedikit fasilitas kesehatan dibangun, tapi tidak tersedia pelayanan kesehatan karena tidak ada tenaga kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari pengelolaan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, dalam hal pemberian pelayanan di rumah sakit umum, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak perlu memakan waktu menunggu yang terlalu lama.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, merupakan suatu keharusan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Halmahera Utara, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia. Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari Umur Harapan Hidup, karena indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya, namun indikator status kesehatan lainnya perlu dibahas dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan data yang tersedia antara lain penolong proses kelahiran sampai dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.

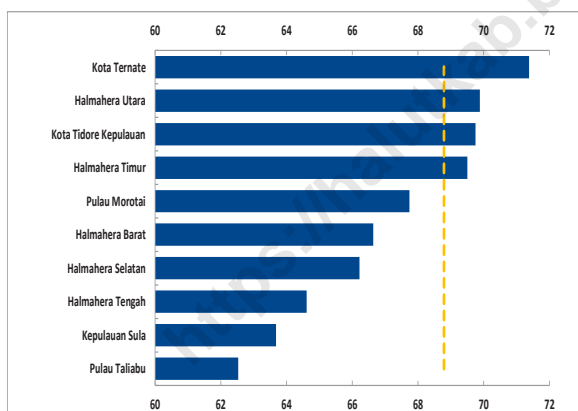
Status kesehatan penduduk diukur dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Umumnya indikator untuk mencerminkan status kesehatan diperoleh secara tidak langsung menggunakan estimasi tertentu, mengingat data kematian sulit diperoleh. Indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan status kesehatan adalah mortalitas, status gizi dan morbiditas. Sampai saat ini data untuk mengukur status kesehatan tersebut sulit diperoleh, karena sifat kejadian insidental dan tersebar di masyarakat, sistem registrasi belum berjalan dengan baik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan setiap kejadian tersebut juga masih rendah.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian IPM adalah Umur Harapan Hidup. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan



GAMBAR 4.1
Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia dan
Provinsi Maluku Utara, 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 4.2
Umur Harapan Hidup (UHH) di Maluku Utara menurut
Kabupaten/Kota, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

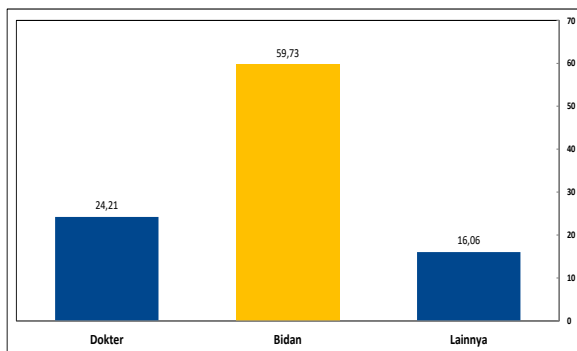
Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Halmahera Utara, dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Umur Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 71,24 tahun dan meningkat menjadi 71,74 tahun pada tahun 2023. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara meningkat. Namun demikian, bila dibandingkan dengan angka UHH Nasional, UHH Halmahera Utara masih di bawah UHH Nasional yang mencapai 73,93 tahun di tahun 2023.

Indikator Umur Harapan Hidup berhubungan erat dengan indikator Angka Kematian Bayi. Tinggi rendahnya nilai indikator Angka Kematian Bayi dipengaruhi oleh indikator

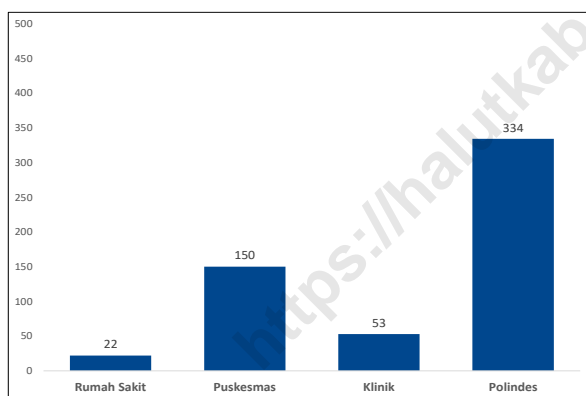
lainnya, yaitu status kesehatan reproduksi yang meliputi persalinan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2023, di Kabupaten Hamahera Utara menunjukkan bahwa penolong persalinan terbesar adalah oleh bidan yang mencapai 62,42 persen. Persentase persalinan yang ditolong oleh lainnya (meliputi dukun beranak dan lainnya) sebesar 16,99 persen menunjukkan bahwa masyarakat telah percaya kepada tenaga kesehatan dalam menolong persalinannya dikarenakan kualitasnya yang sudah baik.

Adanya peningkatan status kesehatan penduduk Kabupaten Halmhaera Utara, dapat tercermin dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Pada tahun 2023 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun



GAMBAR 4.3
Persentase Penolong Proses Persalinan Terakhir dari Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 4.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

orang, farmasi 69 orang, tenaga gizi 45 orang, kesehatan masyarakat 79 orang, dan tenaga medis lainnya 23 orang. Jumlah tenaga kesehatan ini masih perlu penambahan khususnya dokter dan bidan, karena akan melayani penduduk di 17 kecamatan dan 198 desa.

Melihat pada kedua data yaitu fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara ini, maka strategi yang dapat diambil adalah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan (khususnya dokter dan bidan) serta menjamin pemerataan penempatan tenaga kesehatan dan alat kesehatan modern di Kabupaten Halmahera Utara. Dengan meningkatkan jumlah bidan maka persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan akan meningkat sehingga akan menurunkan angka kematian bayi. Secara garis besar, strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih

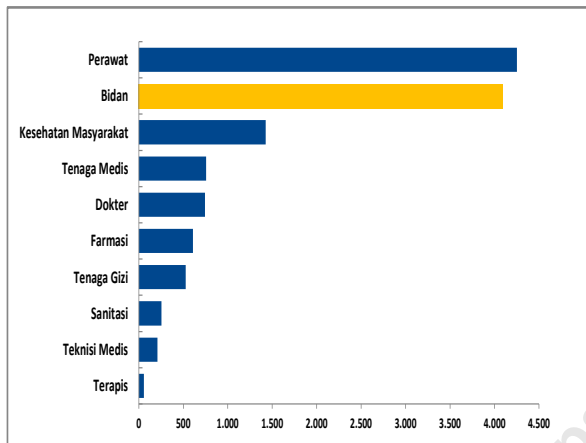
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu, sebesar 9,36 persen, sedangkan pada tahun 2022 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebesar 16,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurun 41,79 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara terdapat sebanyak 2 rumah sakit umum dan khusus, 24 puskesmas, 281 posyandu, 5 klinik kesehatan, dan 51 pondok bersalin desa (polindes). Dengan jumlah ini maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara dapat berjalan dengan baik, selain perlunya ditambah alat kesehatan yang modern dan memadai.

Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023, tersedia sebanyak 65 tenaga medis. Sedangkan jumlah bidan terdapat sebanyak 615 orang. Jumlah tenaga kesehatan seperti perawat sebanyak 478

cepat dan lebih mudah dijangkau oleh penduduk Kabupaten Halmahera Utara.

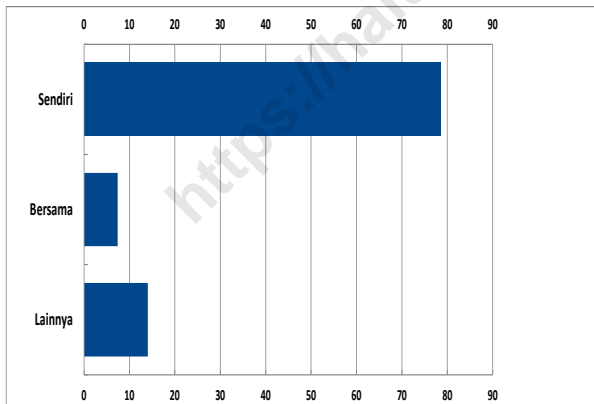
Kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara berhubungan erat dengan



GAMBAR 4.5
Banyaknya Tenaga Kesehatan di
Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

kondisi sanitasi di lingkungan perumahan tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2023, tercatat bahwa masih ada sebesar 32,13 persen penduduk yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri maupun bersama. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hamahera Utara karena sangat pentingnya sarana ini untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.



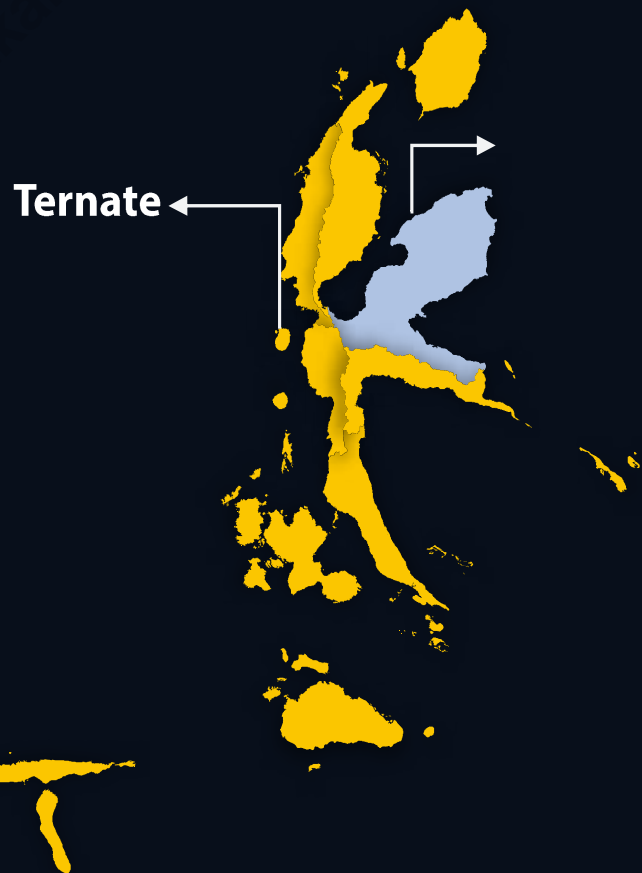
GAMBAR 4.6
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air
Besar di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Maluku Utara Maret 2023

● Indonesia ● Maluku Utara

Persentase
Penduduk
Miskin
Kabupaten /

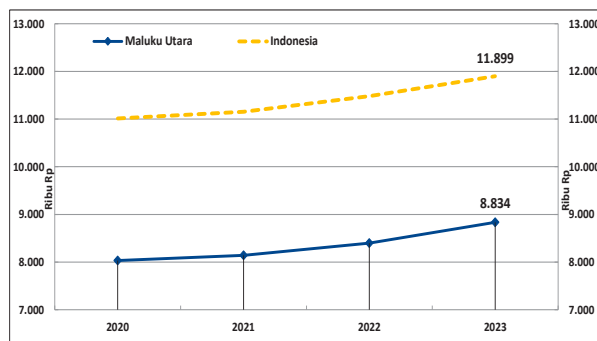


"Economic growth without investment in human development is unsustainable"

Pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan. Salah satu pilihan tersebut adalah untuk dapat hidup dengan layak dan hidup yang sesuai dengan pilihannya. Dalam bidang pekerjaan misalnya, seseorang ingin mempunyai kemampuan untuk memilih bekerja di lingkungan pemerintahan atau swasta; untuk tempat tinggal bisa memilih di dalam kota yang lebih dekat dengan kantor atau di pinggir kota yang lebih nyaman; untuk transportasi mampu memilih dengan mobil sendiri, atau angkutan umum, dan pilihan berbagai segi kehidupan lainnya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa hakekat dari kesejahteraan manusia itu terletak pada kemampuan juga kebebasan dalam memilih.

Dalam paradigma pembangunan ini, pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, ketrampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia.

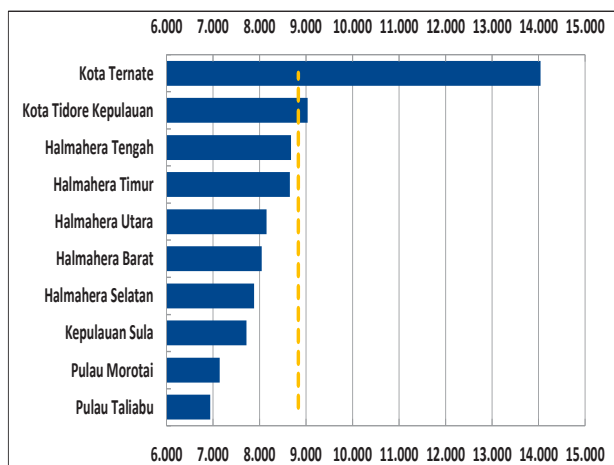
Tetapi seringkali data indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali *under estimate* sehingga diperlukan sebuah indikator lainnya yang



GAMBAR 5.1
Perkembangan Pengeluaran Per kapita Disesuaikan di
Provinsi Maluku Utara, 2020–2023

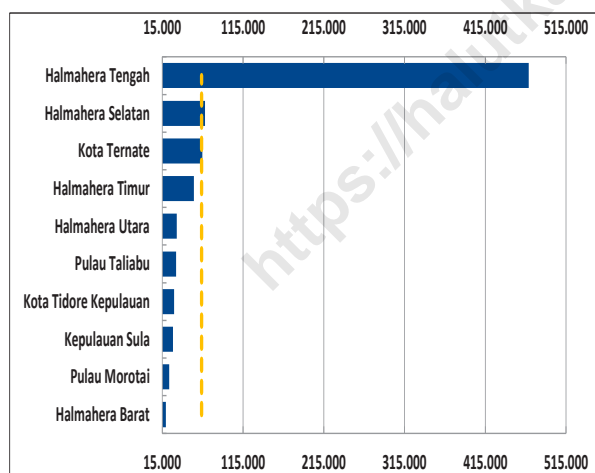
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

dapat mendekati indikator pendapatan ini. Di dalam penghitungan IPM, digunakan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) untuk mendekati indikator pendapatan. Berdasarkan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Halmahera Utara terlihat bahwa perkembangan indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2023.



GAMBAR 5.2
Pengeluaran Per kapita Disesuaikan di
Provinsi Maluku Utara (ribu rupiah), 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 5.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (ribu rupiah),
2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

PDRB Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 sebesar 6.74 triliun rupiah, sedangkan bila dihitung berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 4.03 triliun rupiah.

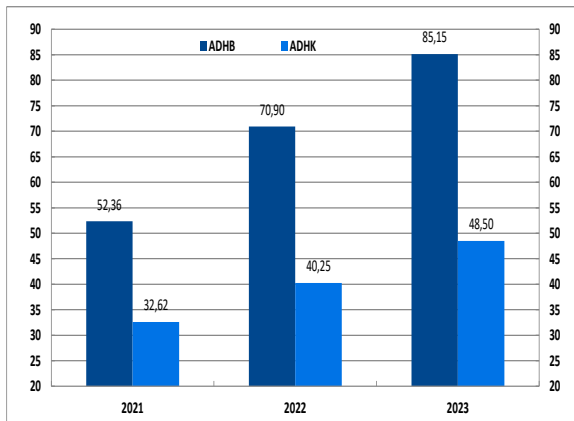
Di tingkat Provinsi Maluku Utara, PDRB Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke 4 di Maluku Utara. Dari data ini mencerminkan bahwa potensi yang ada belum digali dengan optimal, khususnya potensi pertanian dan pariwisata yang

Capaian indikator pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 8.125 ribu rupiah masih cukup jauh jika dibandingkan dengan angka Indonesia yang sebesar 11.899 ribu rupiah. Dilihat dari indikator PDRB per kapita Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 32.86 juta rupiah.

Pembangunan manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia tidak dapat berlanjut. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat berlanjut tanpa pembangunan manusia. Kebijakan yang proaktif diperlukan untuk memperkuat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia tersebut. Oleh karena itu pada ulasan berikutnya akan dibahas tentang perekonomian Kabupaten Halmahera Utara dan perbandingan di tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara.

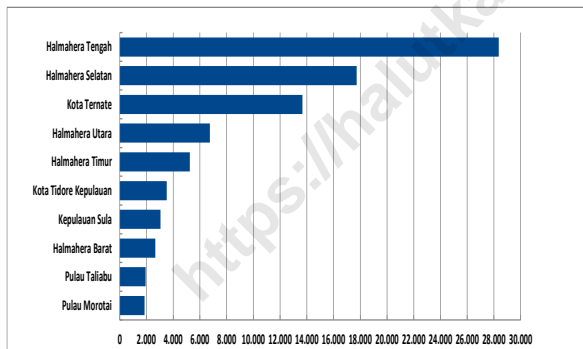
5.1 Perekonomian

Angka PDRB menunjukkan besarnya nilai produksi bersih yang tercipta dari aktivitas perekonomian di suatu wilayah.



GAMBAR 5.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Maluku Utara (triliun rupiah), 2021–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 5.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berlaku
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (miliar rupiah),
2023

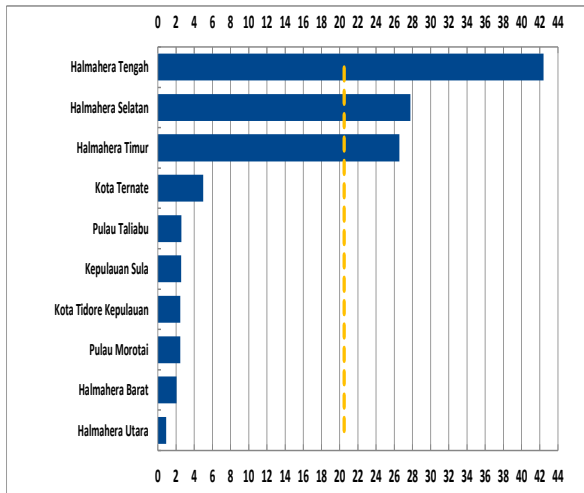
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

dan sepeda motor (12,49 persen) dan pada urutan ke tiga adalah administrasi pemerintahan, pertanian dan jaminan sosial wajib (12,18 persen)

apabila dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Halmahera Utara.

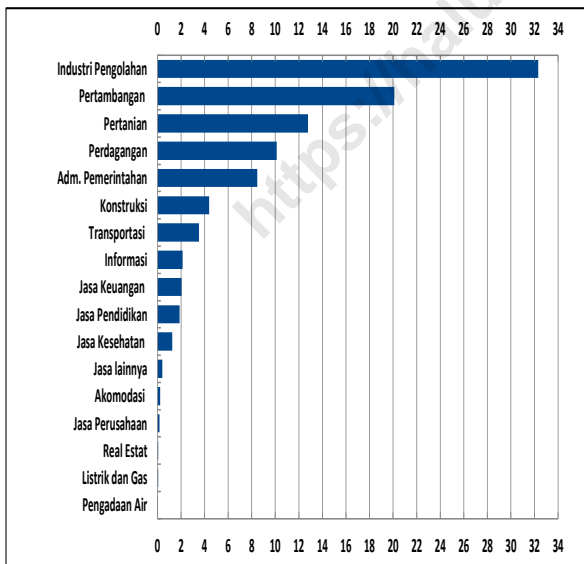
Perekonomian Kabupaten Halmahera Utara selama periode tahun 2019–2023 mampu tumbuh positif walaupun berfluktuatif. Perekonomian Maluku Utara mengalami kontraksi pada tahun 2020. Perekonomian Maluku Utara pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 0,92 persen. Laju ini sedikit melambat dibanding tahun 2022 yang mencapai 3,74. Perlambatan ini disebabkan karena adanya penurunan produksi pada pertambangan logam dasar.

Dilihat dari struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 tampak bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi perekonomian di kabupaten ini, yaitu dengan persentase sebesar 30,37 persen. Kategori terbesar kedua setelah industri pengolahan yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil



GAMBAR 5.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara



GAMBAR 5.7
Distribusi Ekonomi Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

dari tahun 2022. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara adalah 8,79 ribu jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2020

5.2 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 96.557 jiwa. Apabila ditilik lagi untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 memiliki nilai sebesar 6,53 persen. Angka ini meningkat jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 6,06 persen.

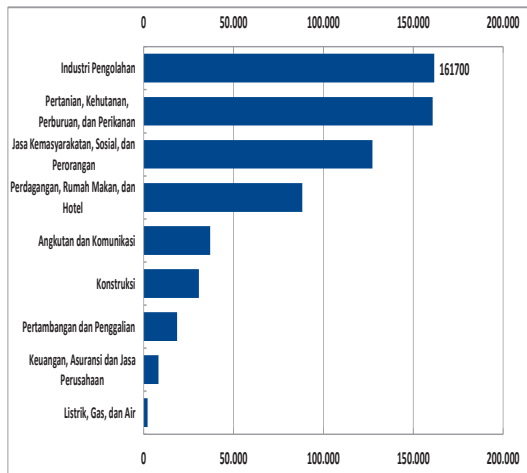
Keadaan ketenagakerjaan ini hendaknya digunakan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bahwa dengan memberikan kebijakan yang dapat mengangkat sebagian besar kesejahteraan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara ini.

5.3 Kemiskinan

Secara umum jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan naik kembali di tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dan di tahun 2023 mengalami kenaikan yang mencapai nilai 4,62 persen.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 9,48 ribu jiwa atau meningkat 3,26 persen

dan 2021 menjadi 8,75 ribu jiwa dan 10,16 ribu jiwa.

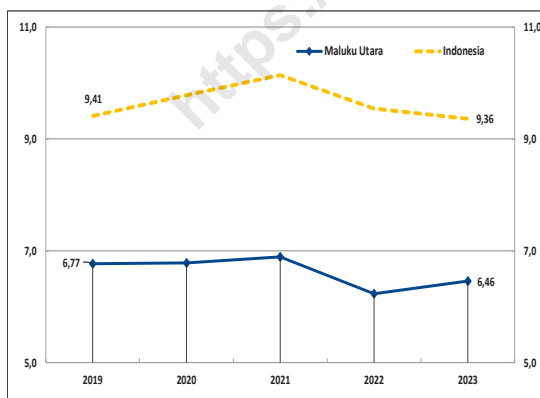


GAMBAR 5.8

Penduduk 15+ Bekerja di Provinsi Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,01 ribu jiwa. Namun pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara kembali mengalami peningkatan menjadi 9,18 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dibandingkan dengan nasional.



GAMBAR 5.9

Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Maluku Utara, 2019–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

<https://halutkab.bps.go.id>

• Peringkat IPM Maluku Utara

7 29

• IPM Menurut Kabupaten/Kota



IPM Tertinggi



UHH Tertinggi



HLS Tertinggi



RLS Tertinggi



Pengeluaran Perkapita Tertinggi



"All human development, no matter what form it takes, must be outside the rules; otherwise we would never have anything new."

6.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpendidikan dan berkecakupan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
- b. IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebesar 69,79 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 69,13 atau meningkat 0,95 persen. Capaian pembangunan manusia di Maluku Utara ini tergolong IPM sedang.
- c. Secara regional IPM Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke-4 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

6.2 Saran

Sebagai suatu alat ukur yang tunggal dan sederhana, IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah (negara, propinsi, kabupaten/kota).

IPM menggambarkan kualitas hidup manusia ditinjau dari tiga aspek yang paling mendasar yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran, maka perlu adanya tindakan lebih lanjut dari para pengambil keputusan baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi sasaran utama dalam pembangunan manusia.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan manusia maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Di bidang kesehatan, strategi yang dapat diambil adalah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan (khususnya dokter dan bidan) dan alat kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara serta menjamin distribusi yang merata berdasarkan analisis

kebutuhan di tiap wilayah. Secara garis besar, dengan strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah dijangkau oleh penduduk Kabupaten Halmahera Utara.

Di bidang pendidikan, perlu adanya dorongan agar penduduk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi serta mengefektifkan program belajar 9 tahun. Di samping itu, pembangunan fasilitas sekolah serta akses menuju fasilitas tersebut hingga ke pelosok perlu ditingkatkan. Serta pemberian beasiswa, kebijakan sekolah gratis dan bantuan siswa kurang mampu merupakan alternatif terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dibidang ekonomi, pemerintah dan dinas terkait perlu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang belum bekerja; menyiapkan kondisi Kabupaten Halmahera Utara yang nyaman bagi para investor; menyediakan bantuan modal bagi usaha yang telah menyerap tenaga kerja yang banyak; memberikan pelatihan dan pelatihan bagi pengusaha sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya.

<https://halutkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2022. Ternate:Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2022. Jakarta:Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2024). Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2024. Ternate:Badan Pusat Statistik

<https://halutkab.bps.go.id>



➤ Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota

➤ rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota

➤ Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota

➤ Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota



Lampiran 1
Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Hasil Proyeksi Long Form SP2020 di Provinsi
Maluku Utara (Tahun), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	70,06	70,17	70,47	70,76
Halmahera Barat	69,83	69,90	70,21	70,46
Halmahera Tengah	69,25	69,49	69,75	70,19
Kepulauan Sula	67,93	68,02	68,29	68,54
Halmahera Selatan	69,37	69,66	69,97	70,25
Halmahera Utara	71,24	71,29	71,53	71,74
Halmahera Timur	70,46	70,63	71,03	71,36
Pulau Morotai	69,93	70,09	70,46	70,81
Pulau Taliabu	66,47	66,57	66,83	67,04
Kota Ternate	71,93	72,01	72,28	72,55
Kota Tidore Kepulauan	71,56	71,64	71,91	72,20

Sumber :BPS Provinsi Maluku Utara

Keterangan

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP202-LF)

Lampiran 2
Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Hasil Proyeksi SP2010 di Provinsi Maluku Utara
(Tahun), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	68,33	68,45	68,79	69,11
Halmahera Barat	66,25	66,34	66,64	66,91
Halmahera Tengah	63,91	64,15	64,61	65,06
Kepulauan Sula	63,30	63,39	63,68	63,94
Halmahera Selatan	65,86	65,93	66,22	66,50
Halmahera Utara	69,56	69,61	69,88	70,11
Halmahera Timur	68,88	69,08	69,50	69,90
Pulau Morotai	67,18	67,35	67,74	68,10
Pulau Taliabu	62,10	62,22	62,53	62,79
Kota Ternate	70,97	71,06	71,38	71,70
Kota Tidore Kepulauan	69,34	69,43	69,75	70,10

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Keterangan

UHH: Umur Harapan Hidup dari hasil Proyeksi SP2010

Lampiran 3
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Persen), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	13,67	13,68	13,73	13,74
Halmahera Barat	13,19	13,20	13,23	13,24
Halmahera Tengah	12,99	13,11	13,22	13,23
Kepulauan Sula	12,74	12,77	12,96	12,97
Halmahera Selatan	12,78	12,79	12,97	13,03
Halmahera Utara	13,60	13,61	13,67	13,68
Halmahera Timur	12,75	12,76	12,86	12,87
Pulau Morotai	12,77	12,93	12,97	12,99
Pulau Taliabu	12,59	12,65	12,86	12,87
Kota Ternate	15,74	15,75	15,76	15,78
Kota Tidore Kepulauan	14,31	14,32	14,36	14,48

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Lampiran 4
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Tahun), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	9,04	9,09	9,24	9,26
Halmahera Barat	8,35	8,37	8,57	8,58
Halmahera Tengah	9,00	9,01	9,02	9,19
Kepulauan Sula	8,95	9,00	9,02	9,04
Halmahera Selatan	7,93	8,10	8,16	8,17
Halmahera Utara	8,51	8,62	8,63	8,65
Halmahera Timur	8,26	8,27	8,52	8,66
Pulau Morotai	7,39	7,40	7,42	7,55
Pulau Taliabu	7,66	7,67	7,94	7,97
Kota Ternate	11,71	11,81	12,06	12,07
Kota Tidore Kepulauan	9,73	9,95	9,96	9,97

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Lampiran 5
Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Ribu Rupiah), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	8.032	8.140	8.398	8.834
Halmahera Barat	7.352	7.467	7.636	8.046
Halmahera Tengah	7.841	7.966	8.212	8.675
Kepulauan Sula	6.950	7.040	7.417	7.718
Halmahera Selatan	7.068	7.142	7.479	7.883
Halmahera Utara	7.414	7.519	7.774	8.152
Halmahera Timur	7.876	7.973	8.230	8.650
Pulau Morotai	6.290	6.378	6.767	7.141
Pulau Taliabu	6.390	6.467	6.623	6.939
Kota Ternate	13.091	13.290	13.586	14.042
Kota Tidore Kepulauan	8.188	8.316	8.586	9.034

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Lampiran 6
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
(Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	69,30	69,56	70,26	70,98
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Keterangan

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP202-LF)

Lampiran 7
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
(Umur Harapan Hidup Hasil SP2010), 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU UTARA	68,49	68,76	69,47	70,21
Halmahera Barat	65,31	65,56	66,20	66,91
Halmahera Tengah	65,42	65,82	66,49	67,48
Kepulauan Sula	63,53	63,80	64,70	65,29
Halmahera Selatan	63,84	64,19	65,06	65,83
Halmahera Utara	67,50	67,82	68,38	69,05
Halmahera Timur	66,75	67,00	67,93	68,82
Pulau Morotai	62,50	62,90	63,80	64,73
Pulau Taliabu	60,48	60,73	61,64	62,31
Kota Ternate	79,82	80,14	80,81	81,35
Kota Tidore Kepulauan	70,53	70,99	71,55	72,40

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara
Keterangan

UHH: Umur Harapan Hidup dari hasil Proyeksi SP2010

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No 65 Ternate,

Telp (0921) 3127878, Fax (0921) 3126301

E-mail : bps8200@bps.go.id | Website : <http://malut.bps.go.id>

ISSN 2460-7517

